

Fragmentasi Politik dan Habitus: Kasus Persaingan Sesama Calon Legislatif Etnis Tionghoa di Tiga Pemilu

Rudi Salam Sinaga¹ & Adam²

^{1,2} Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area

Received: 24 Agustus 2020

Revised: 24 Oktober 2020

Published: 29 Oktober 2021

Abstrak:

Studi ini beranjak dari fenomena meningkatnya jumlah calon legislatif (caleg) etnis Tionghoa di tiga pemilu (2004, 2009, 2014) pada konteks pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan dalam studi ini terjadi persaingan yang semakin kuat antara sesama caleg etnis Tionghoa pada daerah pemilihan (dapil) sumatra utara (Sumut) 1 yang menimbulkan munculnya pertanyaan penelitian dalam studi ini mengapa caleg etnis Tionghoa memilih maju di dapil Sumut 1 dan bagaimana mobilisasi suara dilakukan?. Untuk menemukan jawaban terhadap penelitian ini maka studi ini menetapkan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda dari penelitian terdahulu yang menyebutkan kebangkitan semangat etnis di era pasca-Soeharto tidak terjadi di kota Medan secara spesifik pada lokasi studi ini. Temuan yang didapatkan terjadi fragmentasi politik di kalangan etnis Tionghoa yang dibentuk oleh *Habitus* yang ada pada area masing-masing. Tingginya persaingan sesama caleg etnis Tionghoa di dapil Sumut 1 sebagai pertanda bahwa demokrasi dengan sistem pemilu proporsional terbuka mengurangi peningkatan sentimen etnis dalam pemilu. Pada sisi lainnya area domisili dan mobilitas bisnis yang tinggi seperti Kota Medan dianggap sebagai dapil yang bergengsi untuk mengukur kemampuan keterampilan politik di pemilu.

Keywords:

fragmentasi politik; *habitus*; Etnis Tionghoa; persaingan; mobilisasi

Introduction

Studi yang dilakukan Protsyk dan Marius (2010) dan Yan (2009) telah menjelaskan semangat kelompok etnis minoritas untuk meraih keterwakilan politik muncul dalam suasana sistem pemilihan umum (pemilu) yang terbuka. Pada arena pemilu kelompok etnis cenderung menggunakan jaringan komunitas etnis untuk memobilisasi suara. Dalam pandangan Collet (2008: 723) situasi seperti itu dapat dikarenakan keterbatasan struktural yang melekat dalam kelompok etnis minoritas. Persoalan lainnya dalam kelompok etnis minoritas yang ditemukan

Korespondensi:

Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Jalan Sei Serayu Nomor 70 A / Jalan Setia Budi Nomor 79 B, Medan 20112.
Email: rudifisipusu@gmail.com

Juenke dan Shah (2016) berkaitan dengan ketersediaan figur yang memiliki kelayakan sebagai kandidat dan memiliki peluang terpilih.

Dalam konteks nasional di Indonesia etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas yang sedang berupaya meraih keterwakilan politik di bawah sistem pemilu terbuka tanpa kuota etnis. Pasca berakhirnya rezim orde baru Giblin (2003) mencatat etnis Tionghoa mulai membentuk kesadaran politik mereka melalui pembentukan sejumlah organisasi komunitas berbasis sosial. Keadaan tersebut berbeda ketika era orde baru berkuasa dengan menerapkan pembatasan aktivitas sosial politik dan melonggarkan aktivitas di bidang ekonomi sektor swasta bagi masyarakat etnis Tionghoa (lihat Mazingo, 1973; Chong, 2018: 8; Chong, 2016; Eifert, 2012: 88; Sai dan Hoon, 2013). Menjelang pemilu tahun 1999 terdapat sebagian tokoh dari kalangan etnis Tionghoa membentuk partai politik sebagai sarana untuk meraih keterwakilan politik mereka seperti Partai Pembauran Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia dan lain sebagainya (Freedman, 2003: 444; Siddik, 2010: 89-90; Prasetyawan, 2014: 47). Meskipun pada akhirnya partai politik yang telah dibentuk tidak mampu bertahan lebih lama (Wu Ling, 2014: 214).

Dalam konteks lokal di provinsi Sumatera Utara (Sumut) sejumlah peneliti telah memberikan perhatian terhadap partisipasi politik etnis Tionghoa untuk meraih keterwakilan politik di legislatif di antaranya Sinaga *et al.*, (2018) persaingan sesama caleg etnis Tionghoa di pemilihan legislatif provinsi Sumut tahun 2014. Sinaga *et al.* (2019) mengeksplorasi pilihan partai dan penyebab perpindahan partai di kalangan caleg etnis Tionghoa. Sementara itu studi lainnya memberikan perhatian kepada keterlibatan organisasi komunitas etnis Tionghoa sebagai kelompok pendukung caleg (Damanik, 2016: 70-86; Humaizi, Ermansyah dan Sinaga, 2018; Sarumpaet, 2009). Studi ini mengambil posisi berbeda dari penelitian sebelumnya. Studi ini berupaya untuk dapat memahami fenomena persaingan sesama caleg etnis Tionghoa di daerah pemilihan (dapil) Sumut 1 di setiap pemilihan legislatif Provinsi Sumut yang berlangsung di era pasca-reformasi (2004-2014).

Pada tiga pemilu yang terjadi di era-pasca reformasi (2004-2014) di tingkat lokal yakni pada pemilihan anggota legislatif Provinsi Sumut memperlihatkan terjadi persaingan yang ketat di antara sesama caleg etnis Tionghoa di dapil Sumut 1. Persaingan tersebut bermula di pemilu tahun 2004 kemudian persaingan semakin ketat terjadi di pemilu 2009 dan 2014. Pada pemilu tahun 2004 terdapat 3 caleg etnis Tionghoa yang saling bersaing. Kemudian persaingan sesama caleg etnis Tionghoa semakin ketat di pemilu tahun 2009 dengan jumlah 8 orang caleg etnis Tionghoa dan pada pemilu tahun 2014 terdapat 5 caleg etnis Tionghoa. Persaingan ini terjadi di dapil Sumut 1 untuk meraih suara dari kalangan pemilih yang berada di 11 wilayah kecamatan di Kota Medan yaitu Kecamatan Medan Amplas, Medan Area, Medan

Belawan, Medan Deli, Medan Denai, Medan Kota, Medan Labuhan, Medan Marelان, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur.

Secara umum karakteristik pemilih di Kota Medan terbagi kedalam tiga tipe karakteristik pemilih yaitu: pemilih rasional, emosional dan transaksional. Kota Medan merupakan daerah yang plural dan multi etnis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut menempatkan populasi etnis Tionghoa pada urutan ke 5 di tingkat Provinsi. Jumlah populasi tersebut kebanyakan terpolarisasi di Kota Medan. Data Badan Pusat statistik Kota Medan sebagaimana dicatat Mukmin dan Damanik (2018: 135) jumlah populasi etnis Tionghoa di Kota Medan mencapai 11,34%. Populasi etnis Tionghoa di Kota Medan sebagian besar tersebar di kecamatan yang berada dalam wilayah daerah pemilihan Sumut 1.

Dalam konteks pemilihan anggota legislatif Provinsi Sumut yang berlangsung di era pasca-reformasi partisipasi etnis Tionghoa menjadi caleg semakin meningkat di setiap pemilu (2004 hingga 2014) untuk bersaing di dapil Sumut 1. Keadaan ini memperlihatkan etnis Tionghoa sangat antusias menjadi caleg di dapil dengan populasi etnis Tionghoa yang cukup banyak. Situasi ini memunculkan dugaan dalam mekanisme pemilu terbuka di tengah demografi dapil yang plural dan multi etnis serta penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak namun konsentrasi caleg etnis Tionghoa untuk meraih suara di pemilu masih dipusatkan pada segmentasi pemilih dari kalangan internal etnis Tionghoa.

Dengan jumlah caleg etnis Tionghoa yang banyak di dapil Sumut 1 serta asumsi merebut suara hanya dari segmentasi pemilih etnis Tionghoa maka pertanyaan yang menarik untuk dimunculkan dalam studi ini adalah mengapa memilih maju di dapil Sumut 1 dan bagaimana mobilisasi suara dilakukan? Maka dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian ini tulisan ini menggunakan teori Wu Ling (2014) sebagai teori utama dan teori mengenai perilaku politik para politisi etnis Tionghoa dan teori *Habitus* dari Bourdieu (2005: 43-49) sebagai teori pendukung.

Disertasi Wu Ling (2014: 188) yang dilakukan pada dua lokasi penelitian yakni kota Medan dan Surabaya menghasilkan teori perilaku politik politisi etnis Tionghoa yang maju menjadi caleg cenderung berkolaborasi dengan kalangan pengusaha Tionghoa yang mapan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan kampanye. Hubungan tersebut bersifat simbiosis mutualisme. Wuling mengklasifikasikan perilaku politisi etnis Tionghoa ke dalam dua tipe yaitu: 1) idealis, dan 2) kepentingan pribadi. Meski lokasi studi Wu Ling (2014) dengan studi ini memiliki kesamaan lokasi namun studi ini hanya akan meneliti satu dapil saja yaitu dapil Sumut 1 yang meliputi 11 kecamatan di kota Medan. Dengan predikat kota Medan sebagai daerah sentral bisnis di Provinsi Sumut serta profesi etnis Tionghoa yang identik dengan profesi

pekerjaan di dunia bisnis maka teori Wuling (2014) dianggap relevan untuk mendeskripsikan perilaku politik politisi etnis Tionghoa di dapil Sumut 1.

Sementara itu teori *Habitus* yang dikemukakan Bourdieu (2005) digunakan untuk menjelaskan tentang kemampuan individu untuk mempersepsikan dan mentransformasikan keinginan personal diri pada suatu arena lingkungan. Hal ini berkaitan dengan cara individu untuk mencapai tujuan di tengah keadaan yang dinamis dan beragam kepentingan yang ada di dalam lingkungan seperti halnya pada situasi yang dihadapi caleg di pemilu.

Studi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan aktivitas, interaksi dan proses pada kurun waktu tertentu (pemilu pasca-reformasi) sehingga penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus dianggap relevan untuk diterapkan dalam studi ini (Creswell, 2014). Data diperoleh melalui wawancara dengan caleg etnis Tionghoa yang maju di pemilihan DPRD 2004 hingga 2014 dan pengurus partai politik yang mengakomodasi caleg etnis Tionghoa. Selain itu studi ini didukung dengan data yang didapatkan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi. Data profil caleg dan hasil suara caleg pada setiap pemilu diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumut. Data dokumen internal partai politik digunakan untuk menganalisis ideologi dan platform partai politik. Interpretasi data menggunakan teknik triangulasi kemudian dianalisis secara deskriptif.

Fragmentasi Politik: Persaingan Sesama Caleg Etnis Tionghoa.

Berdasarkan sensus penduduk (SP) tahun 2010 populasi etnis Cina di Provinsi Sumut berada pada peringkat ke 5 dengan jumlah populasi mencapai 340.320 jiwa. Peringkat terbanyak ditempati etnis Batak berjumlah 5.785.716 jiwa, etnis Jawa berjumlah 4.319.719 jiwa, etnis Nias berjumlah 911.820 jiwa, etnis Melayu berjumlah 771.668 jiwa dan masih terdapat etnis lainnya dengan total keseluruhan jumlah penduduk berjumlah 12.981.432 jiwa dan kemudian pada tahun 2013 menurut BPS Provinsi Sumut jumlah penduduk meningkat menjadi berjumlah 13.326.307 Jiwa (BPS Provinsi Sumut, 2013). Dari data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik Kota Medan yang dicatat Panggabean dan Smith (2011: 234) populasi etnis Tionghoa mencapai 10,7 persen dari total jumlah penduduk Kota Medan sebesar 1.904.104 jiwa. Chong (2015: 492) dan Wu Ling (2014: 21) mencatat 10,65 persen sehingga diperkirakan populasi etnis Tionghoa sekitar 202.787 jiwa. Pada catatan lainnya Arifin, Hasbullah dan Pramono (2017: 320) mencatat populasi etnis Tionghoa mencapai 201.519 jiwa di tahun 2010. Secara nasional populasi etnis Tionghoa di kota Medan sebagai populasi terbesar ke 2 setelah Jakarta.

Persaingan sesama caleg etnis Tionghoa untuk memperebutkan kursi di legislatif di tingkat Provinsi Sumut pertama kali terjadi di pemilu tahun 2004. Pada

pemilu tahun 2004 terdapat 3 caleg etnis Tionghoa yang bertarung di dapil Sumut 1 yang berada di kota Medan. Dapil Sumut 1 meliputi 11 kecamatan di kota Medan yaitu: Medan Amplas, Medan Area, Medan Belawan, Medan Deli, Medan Denai, Medan Kota, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur. Data demografi kependudukan masyarakat kota Medan berdasarkan etnis tidak ditemukan namun berdasarkan catatan Mukmin dan Damanik (2018) didapatkan persentase etnis Tionghoa di kota Medan pada tahun 2004 mencapai 11,34 persen yang tersebar di berbagai kecamatan. Dalam wilayah kecamatan di kota Medan populasi etnis Tionghoa terbanyak diperkirakan berada di 6 kecamatan yaitu: Medan Area, Medan Kota, Medan Maimun, Medan Petisah, Medan Barat (Mukmin dan Damanik, 2018: 135). Bila menggunakan data ini maka terdapat dua kesamaan kecamatan pada dapil Sumut 1 yaitu Medan Area dan Medan Kota. Meski demikian data 2004 tersebut belum mampu digunakan sebagai acuan utama karena studi ini hingga kurun waktu 2014.

Ketiga caleg di dapil Sumut 1 pada pemilu 2004 bernama Haryanto dari PKPI, Ferdinan Godang dari Partai Demokrat (PD), Sonny Firdaus dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB). Dari ketiga caleg etnis Tionghoa yang bertarung di pemilu ini hanya Haryanto yang memiliki pengalaman politik di partai dan di pemilu yaitu sebagai pengurus PKP dan pernah menjadi caleg DPRD Provinsi Sumut di pemilu tahun 1999. Namun demikian dengan pengalaman ini tampaknya tidak memberikan pengaruh besar bagi Haryanto berdasarkan hasil pemilu tahun 2004 didapati Sonny Firdaus dari PPIB terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut.

Pemilu tahun 2009 terdapat 8 caleg etnis Tionghoa yang saling bertarung meraih suara di dapil Sumut 1. Nama-nama caleg etnis Tionghoa yang meramaikan pertarungan ini adalah Lina /Liu Wan Ling dan Kwik Sam Ho/Dharwan Widjaja dari Partai Golongan Karya (Golkar), Brilian Moktar dari PDIP, Haryanto dari PKPI, Tjoa Seng Hie dan Sonny Firdaus dari PPIB, Kie Hock Kweng dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Ridho/ Kwa Phing An dari Partai Barisan Nasional (PBN). Sejumlah nama caleg etnis Tionghoa yang diketahui memiliki pengalaman politik didapatkan pada figur Sonny Firdaus pernah menjadi caleg DPRD Provinsi Sumut di pemilu 2004, Haryanto sebagai pengurus PKPI dan pernah menjadi caleg DPRD Provinsi Sumut di pemilu tahun 1999 hingga 2004 dan Brilian Moktar sebagai pengurus PDIP di Kota Medan. Hasil pemilu tahun 2009 menempatkan Sonny Firdaus dari PPIB dan Brilian Moktar dari PDIP sebagai caleg terpilih di pemilu ini.

Pada pemilu tahun 2014 partisipasi etnis Tionghoa menjadi caleg DPRD Provinsi Sumut mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2014 terdapat 5 caleg etnis Tionghoa yang bertarung di dapil Sumut 1 yaitu Sonny Firdaus (caleg petahana) dari Gerindra, Brilian Moktar (caleg petahana) dan Ferdinan Godang

dari PDIP, Shanny Joan Salim dan Haryanto dari PKPI. Menurunnya jumlah caleg etnis Tionghoa pada pemilu ini disebabkan terdapat caleg “*Petahana*” dan caleg “lama”. caleg “*Petahana*” adalah caleg yang sedang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara saat pemilu ini dan caleg “lama” adalah caleg yang sudah berulang kali mencalonkan diri namun masih gagal. Kedua tipe caleg ini telah memiliki basis dukungan yang real namun berbeda dalam ukuran “jumlah” pendukung.

Tabel 1: Caleg etnis Tionghoa yang bertarung di dapil Sumut 1 pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di pemilu era pasca-reformasi (2004-2014).

PEMILU	NAMA CALEG	PARTAI	HASIL
2004	Haryanto	PKPI	Tidak Terpilih
	Ferdinan Godang	PD	Tidak Terpilih
	Sonny Firdaus	PPIB	Terpilih
2009	Lina /Liu Wan Ling	Golkar	Tidak Terpilih
	Kwik Sam Ho/Dharwan Widjaja		Tidak Terpilih
	Brilian Moktar, SE	PDIP	Terpilih
	Haryanto, SH	PKPI	Tidak Terpilih
	Tjoa Seng Hie	PPIB	Tidak Terpilih
	Sonny Firdaus, SH.		Terpilih
	Kie Hock Kweng, SE., SH	PPRN	Tidak Terpilih
	Ridho Alias Kwa Phing An	PBN	Tidak Terpilih
2014	Sonny Firdaus, SH	Gerindra	Terpilih
	Brilian Moktar, SE.,MM	PDIP	Terpilih
	Ferdinan Godang, SE.,SH		Tidak Terpilih
	Shanny Joan Salim, SE	PKPI	Tidak Terpilih
	Haryanto, SH		Tidak Terpilih

Sumber: Data diolah kembali dari data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (2004, 2009 dan 2014).

Pada tabel di atas terlihat partisipasi etnis Tionghoa menjadi caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara di pemilu pasca-reformasi mengalami peningkatan di pemilu tahun 2009 dan kemudian jumlah tersebut menurun di pemilu tahun 2014. Penurunan jumlah caleg etnis Tionghoa yang bertarung di dapil Sumut 1 pada pemilu tahun 2014 dikarenakan terdapat caleg “*Petahana*”. Pengalaman pemilu sebelumnya mengajarkan bahwa sangat sulit untuk mendapatkan kursi ketika harus melawan caleg *petahana*. Keberadaan Haryanto sebagai caleg “abadi” membuktikan hal itu.

Berdasarkan data di atas terlihat dapil Sumut 1 sebagai dapil berkumpulnya populasi dan mobilitas etnis Tionghoa yang tertinggi di Sumatera Utara. Sebagai dapil yang berada di arena kota Medan yang identik dengan kota bisnis (industri dan perdagangan) maka kota ini memiliki daya tarik tersendiri bagi caleg etnis Tionghoa karena mayoritas profesi etnis Tionghoa di dapil Sumut 1 yang bekerja di sektor swasta (bisnis). Predikat kota Medan sebagai kota bisnis tentu memiliki nilai tersendiri bagi

kalangan pelaku bisnis. Pada sisi lain tingginya biaya kampanye politik di era pasca-reformasi mengharuskan setiap caleg untuk berupaya mencari sponsor pendanaan.

Terkait biaya politik yang tinggi di era pasca-reformasi Wu Ling (2014: 188) beranggapan keadaan tersebut sebagai pintu masuk bagi kalangan pengusaha etnis Tionghoa untuk melibatkan diri sebagai pendukung caleg melalui pendanaan atau fasilitas. Menurut Wu Ling Hubungan yang terjalin di antara caleg dengan pengusaha Tionghoa di pemilu didasarkan pada hubungan patrimonial yang saling menguntungkan (Wu Ling, 2014: 202). Dengan kata lain pengusaha Tionghoa memberi dukungan keuangan di masa kampanye dan caleg memberikan bantuan politik bila terpilih.

Keadaan di atas sesuai dengan argumen Wu Ling (2014) yang menjelaskan terdapat keterkaitan di antara aktor bisnis dengan aktor politik di setiap pemilu. Dalam konteks penelitian ini ajang kontestasi di dapil Sumut I etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai aktor bisnis berkolaborasi dengan caleg etnis Tionghoa untuk melakukan upaya mobilisasi suara di internal komunitas etnis. Motif balas jasa berbentuk perlindungan politik dan lain sebagainya di klaim Wu Ling (2014: 208-255) sebagai dasar kerja sama di antara kedua belah pihak (aktor bisnis dan politisi). Klaim ini sangat relevan mengingat meningkatnya kecenderungan politik transaksional dan tingginya biaya membangun jaringan dukungan suara di pemilu langsung pasca reformasi (Tans, 2012; Widoyoko, 2018). Penelitian lainnya seperti Aspinall, Dettman dan Warburton (2011) mendapati memobilisasi suara berlangsung dengan kolaborasi kerja sama antara politisi, pengusaha dan preman. Dampak yang ditimbulkan dengan situasi seperti ini adalah meningkatnya fragmentasi politik dalam lingkungan etnis sama. Setiap caleg akan berjuang mencari solusi bagi kebutuhan masing-masing yang bermuara pada tujuan untuk meraih suara terbanyak di pemilu. Pada sisi lain demokrasi telah memberikan kebebasan pandangan politik sekaligus pilihan politik di pemilu.

Fragmentasi politik di dapil Sumut I semakin terasa di tataran aktor elit pada organisasi komunitas menjelang pemilu. Caleg yang menjadi bagian dalam organisasi komunitas tersebut secara informal menegosiasikan kepentingannya kepada elit di struktur organisasi. Harapan caleg agar elit dapat berfungsi sebagai mediator kepada komunitas internal dan eksternal termasuk bagi elit partai.

Habitus dalam Jaringan Mobilisasi Suara

Pertarungan sesama caleg etnis Tionghoa di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut secara tidak langsung telah menunjukkan beberapa hal yakni: 1) terjadi peningkatan kesadaran politik etnis Tionghoa di Provinsi Sumut untuk menempati posisi politik dalam struktur lembaga politik dan 2) tingginya minat caleg etnis

Tionghoa untuk bertarung di dapil yang sama menimbulkan persepsi perpecahan dalam kelompok komunitas etnis Tionghoa.

Partisipasi etnis Tionghoa menjadi caleg DPRD Provinsi Sumut di pemilu tahun 2004 memperlihatkan kesadaran politik etnis Tionghoa pada tingkat Provinsi telah terbentuk. Pada sisi lain kesadaran politik yang diaktualisasikan melalui partisipasi menjadi caleg DPRD Provinsi secara alamiah telah membentuk pertarungan politik di antara figur etnis Tionghoa yang menjadi caleg. Pada periode pemilu 2004 caleg etnis Tionghoa maju dengan inisiatif yang berbeda. Terdapat kandidat yang memiliki inisiatif sendiri mendaftar ke partai politik untuk menjadi caleg dan terdapat caleg maju dengan inisiatif partai politik yang memandang potensi caleg berpeluang terpilih.

Pertarungan politik di antara caleg etnis Tionghoa semakin kuat di pemilu tahun 2009 dan puncaknya berdampak pada lebih sedikit caleg etnis Tionghoa yang berpartisipasi di pemilu tahun 2014. Pada pemilu tahun 2004 dan 2009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) merekrut satu orang etnis Tionghoa sebagai caleg. Satu-satunya caleg tersebut adalah Haryanto yang merupakan ketua PKPI Provinsi Sumut di saat itu. Kemudian pada pemilu tahun 2014 PKPI Haryanto maju kembali menjadi caleg namun pada pemilu ini PKPI meningkatkan jumlah caleg etnis Tionghoa dengan menambahkan caleg dari segmentasi perempuan bernama Shanny Joan Salim.

Jumlah caleg etnis Tionghoa dari PKPI meningkat menjadi 2 caleg di pemilu tahun 2014. Haryanto dan Shanny Joan Salim di usung PKPI di pemilu 2014. Peningkatan jumlah caleg etnis Tionghoa di pemilu tahun 2014 pada dapil Sumut 1 menurut Haryanto kondisi tersebut timbul sebagai kebijakan PKPI untuk merekrut etnis Tionghoa menjadi caleg agar etnis Tionghoa terbiasa dengan dunia politik dan bergaul dengan politisi dari etnis yang berbeda (Haryanto, Ketua PKPI Provinsi Sumut dan Caleg etnis Tionghoa di pemilu 1999-2014, Wawancara, 25 Mei 2018).

Dari kurun waktu pemilu 1999 hingga 2009 terlihat PKPI bertahan untuk tetap mengusung Haryanto sebagai caleg di dapil Sumut 1. Ini mengindikasikan pada tiga periode pemilu (1999-2009) PKPI sebagai partai politik tidak berhasil melakukan fungsi rekrutmen politik dan pengkaderan pada kalangan etnis Tionghoa untuk ditempatkan pada kontestasi legislatif di dapil Sumut 1. Keadaan ini juga dapat menjelaskan komitmen tinggi Haryanto untuk menjadi caleg yang terlihat selalu maju di di tiga pemilu (1999, 2004 dan 2009).

Berangkat dari asumsi-asumsi ini akan sulit untuk mengakui keberadaan Shanny Joan Salim di pemilu tahun 2014 sebagai caleg yang memiliki peluang terpilih. Studi ini menganggap keberadaan Shanny Joan Salim digunakan untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan sekaligus menarik suara dari segmentasi kaum

perempuan etnis Tionghoa. Kebijakan PKPI masih cenderung berorientasi untuk mendukung kepentingan kemenangan Haryanto di pemilu bila membandingkan popularitas Shanny Joan Salim tidak sebanding dengan popularitas Haryanto yang lebih dikenal luas oleh publik di kota Medan yang terlihat pada hasil perolehan suara di tiga pemilu yang diperlihatkan pada tabel 2.

Berbeda halnya dengan Brilian Moktar caleg etnis Tionghoa yang maju pertama kali di Pemilu 2009 dengan hasil terpilih. Kemudian pada pemilu tahun 2014 maju kembali dan terpilih lagi. Brilian Moktar terpilih sebanyak dua kali menjadi anggota legislatif Provinsi Sumut di dapil Sumut 1 dari PDIP. Pilihan Brilian untuk maju dari PDIP dikarenakan PDIP konsisten menegakkan nasionalisme dan membela kaum marginal (Brilian Moktar, Wakil Ketua PDIP Provinsi Sumut dan caleg legislatif provinsi di pemilu 2009-2014, Wawancara, 20 Februari 2017).

Bila merujuk pada pemilu demokratis yang telah dimulai di tahun 2009 dan 2004 Brilian Moktar tampaknya memiliki perhitungan tersendiri terhadap keputusan dirinya baru maju menjadi caleg di pemilu 2009. Sebelum Brilian Moktar berpartisipasi menjadi caleg di pemilu 2009 Brilian Moktar selain sibuk dengan aktivitas ekonomi di sektor swasta namun juga sibuk dengan aktivitas politik di sayap partai (PDIP) yang berkaitan dengan mengadvokasi kepentingan masyarakat. Situasi ini memperlihatkan upaya Brilian Moktar untuk mendekati diri dengan masyarakat.

Caleg etnis Tionghoa lainnya seperti Ferdinan Godang yang maju menjadi caleg di tiga pemilu (2004, 2009 dan 2014) memiliki pertimbangan lain di antaranya pertimbangan untuk memilih menggunakan partai yang berbeda di setiap pemilu. Pada pemilu tahun 2004 Ferdinan Godang maju menjadi caleg di pemilu 2004 dari Partai Demokrat, pemilu 2009 maju dari PKPI dan pada pemilu 2014 Ferdinan Godang maju menjadi caleg dari PDIP. Keadaan ini memperlihatkan Ferdinan Godang memperhitungkan segala sesuatu yang dapat mengakomodasi kepentingannya termasuk ruang komunikasi di dalam partai politik (Ferdinan Godang, caleg etnis Tionghoa di pemilu 2004-2014, Wawancara email, 14 Desember, 2017).

Meski demikian keputusan untuk berpindah-pindah partai dapat mengurangi persepsi publik terhadap konsistensi Ferdinan Godang dalam beraktivitas di partai politik. Dalam pandangan Ferdinan Godang partai politik penting untuk merekrut caleg yang jujur, disiplin, loyal dan tidak hanya orientasi ke dana tetapi lebih pada kualitas caleg (Ferdinan Godang, Caleg etnis Tionghoa di pemilu 2004-2014, Wawancara email, 14 Desember, 2017).

Beberapa caleg etnis Tionghoa yang berhasil diwawancarai terlihat memiliki pertimbangan khusus dalam menentukan kapan dirinya siap untuk bertarung menjadi caleg di pemilu. Selain itu terdapat caleg etnis Tionghoa yang mampu

bertahan di partai politik dan ada yang tidak dapat bertahan dan memilih berpindah partai. Dinamika di internal partai politik selalu mengundang perdebatan dan perbedaan pandangan di sekitar pengambilan keputusan dan metode penggalangan dana. Situasi ini berkaitan dengan apa yang dikemukakan Bourdieu (2005: 45) tentang kemampuan individu untuk memproduksi persepsi dan mentransferkan persepsi ke pada struktur sosial dalam teori *Habitus*.

Konsep teori *Habitus* menjelaskan tentang upaya individu yang berinteraksi terhadap struktur yang ada untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dari struktur objektif menuju struktur tujuan (Bourdieu, 2005: 45-46). Secara teoritis terdapat kemiripan teori Bourdieu (2005) tentang *Habitus* dengan teori struktur-agensi dari Giddens (1984). Kedua teori tersebut sepakat bahwa struktur terbentuk dari intervensi kekuatan-kekuatan sosial dan aktor yang bertindak aktif. Meskipun memiliki kemiripan namun Bourdieu (2005) memberikan kunci penting keberhasilan dari membentuk struktur bergantung pada posisi sosial aktor di lingkungan. Sementara Giddens (1984) tidak menyinggung hal tersebut. Pada konteks studi ini memperlihatkan tingginya persaingan antara sesama caleg etnis Tionghoa di dapil Sumut 1 berakibat pada meningkatnya persaingan mobilisasi suara.

Dari kurun waktu pemilu tahun 2004 hingga 2014 perjalanan tiga pemilu tersebut menampilkan aktor politik sekaligus sebagai agen politik untuk meningkatkan jumlah partisipasi politik etnis Tionghoa sebagai caleg DPRD Provinsi Sumut. Keberadaan aktor politik tersebut berasal dari politisi etnis Tionghoa yang aktif di dalam partai politik. Politisi etnis Tionghoa mengajak rekan etnis Tionghoa untuk menjadi caleg di partai politik dan bekerja sama melakukan mobilisasi suara dari kalangan internal dan eksternal etnis Tionghoa. Dalam proses ini terdapat tindakan yang menyerupai *disposisi* dalam konsep teoritis (Bourdieu, 2005) tentang *Habitus*. *Disposisi* dijelaskan (Bourdieu, 2005) sebagai usaha untuk mempertahankan suatu tujuan. Pada konteks studi ini *disposisi* diwakili dengan upaya mengamankan arena politik di dapil 1 melalui pembentukan tim sukses sebagai mesin untuk memobilisasi suara dan mediator antara caleg dengan konstituen.

Partai politik memiliki akses sumber daya yang sangat luas. Budiatri *et al.* (2018: 326) menyebutkan sumber daya partai berasal dari “orang-orang besar” yang ada di dalam partai. Dengan demikian semakin banyak jumlah orang yang memiliki sumber daya keuangan, fasilitas dan pengaruh yang besar maka partai politik dengan sumber dayanya tersebut mampu menembus *Habitus* di lingkungan segmentasi etnis Tionghoa. Pada saat yang sama partai politik turut membentuk persepsi dan mentransferkan tujuan mereka di dapil Sumut 1 melalui rekrutmen politik terhadap etnis Tionghoa untuk menjadi politisi partai. Kuantitas jumlah partai yang meningkat

dalam mengakomodasi etnis Tionghoa menjadi caleg sebagai bentuk intervensi partai untuk menjaga peluang kemenangan bagi partai lain.

Tabel 2: Latar belakang caleg etnis Tionghoa berdasarkan organisasi sosial, suara dan partai politik

PEMILU	NAMA CALEG	ORGANISASI SOSIAL KOMUNITAS	SUARA	PARTAI POLITIK
2004	Haryanto	Yayasan Sosial Prasetia Utama	2.120	PKPI
	Ferdinan Godang	PSMTI	3.643	Partai Demokrat
	Sonny Firdaus	P-INTI	7.830	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB)
2009	Lina /Liu Wan Ling	Tidak diketahui	383	Golkar
	Kwik Sam Ho/Dharwan Widjaja	Tidak diketahui	1.652	Golkar
	Brilian Moktar, SE	PSMTI, PASTI	8.772	PDIP
	Haryanto, SH	Yayasan Sosial Prasetia Utama	1.039	PKPI
	Tjoa Seng Hie	Tidak diketahui	2.115	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)
	Sonny Firdaus, SH.	P-INTI	10.592	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)
	Kie Hock Kweng, SE., SH	Tidak diketahui	535	PPRN
2014	Ridho Alias Kwa Phing An	Tidak diketahui	140	Partai Barisan Nasional (PBN)
	Sonny Firdaus, SH	P-INTI	7.885	Gerindra
	Brilian Moktar, SE.,MM	PSMTI, PASTI	29.131	PDIP
	Ferdinan Godang, SE.,SH	PSMTI	2.347	PDIP
	Shanny Joan Salim, SE	Tidak diketahui	190	PKPI
	Haryanto, SH	Yayasan Sosial Prasetia Utama	958	PKPI

Sumber: Diperoleh dan diolah dari data KPU provinsi Sumatera utara, wawancara dan telaah dokumentasi.

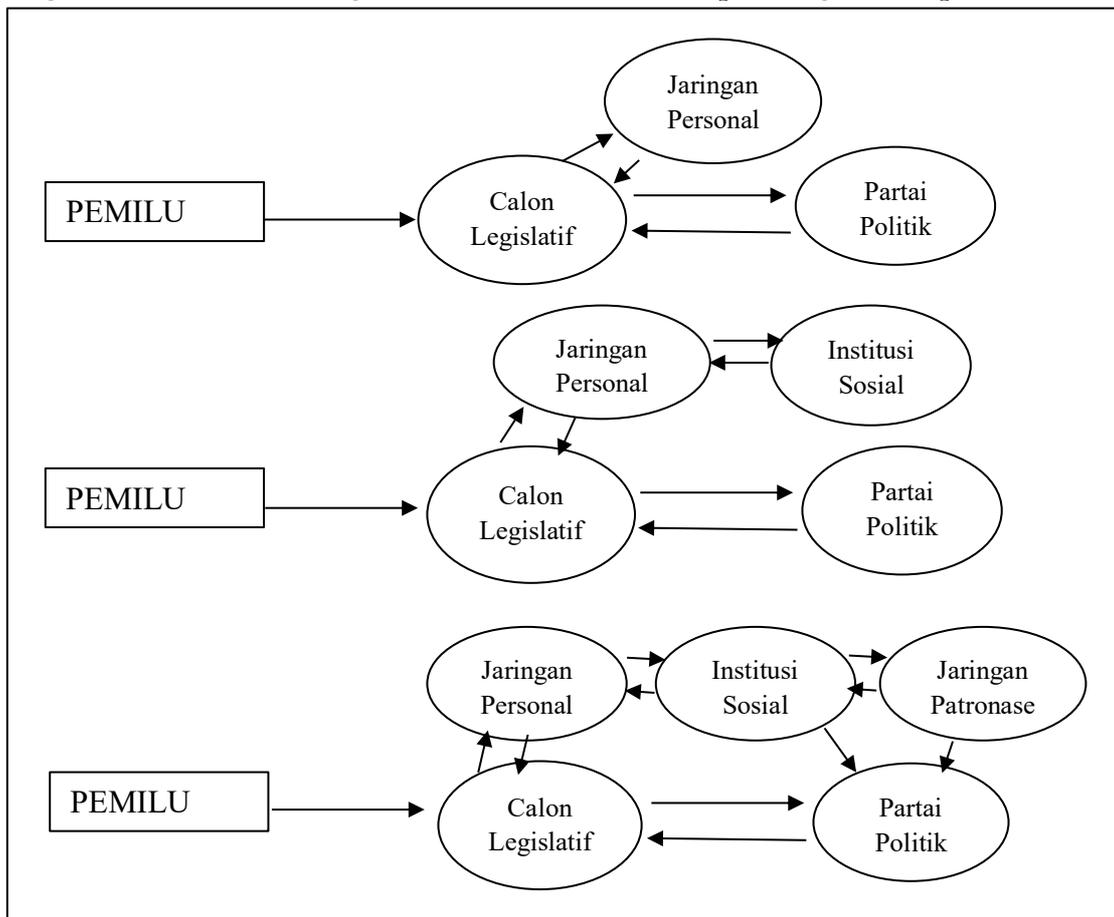
Setiap caleg etnis Tionghoa berharap dapat menarik dukungan suara dari segmentasi etnis Tionghoa dan dari luar etnis Tionghoa atas dasar kedekatan pergaulan. Bila memperhatikan pola interaksi masyarakat etnis Tionghoa yang cenderung eksklusif dan sibuk dalam kegiatan bekerja di sektor ekonomi swasta (pedagang) maka dapat diindikasikan caleg etnis Tionghoa memerlukan akses yang lebih luas untuk dapat memobilisasi suara. Salah satu cara melakukan mobilisasi suara yang dilakukan caleg etnis Tionghoa adalah dengan “menarik” dukungan suara dari organisasi komunitas etnis Tionghoa. Cara ini dianggap lebih dapat meningkatkan peluang meraih dukungan suara karena dua sebab yaitu: 1) organisasi komunitas etnis memiliki anggota yang merupakan pemilih di dapil dan 2) pemimpin di dalam organisasi komunitas memiliki jaringan patronase yang lebih luas dari figur caleg etnis Tionghoa.

Pola mobilisasi dukungan suara berlangsung berbeda pada setiap pemilu di era pasca-reformasi. Letak perbedaan pola tersebut mengarah pada luas jaringan yang dipergunakan. Pada pemilu 2004 caleg etnis Tionghoa menggunakan jaringan personal bersumber dari hubungan kedekatan atau pergaulan. Pemilu 2009 jaringan personal meluas pada area institusi sosial di internal komunitas etnis Tionghoa. Pada situasi ini caleg berharap mendapat dukungan suara dari internal organisasi komunitas. Pemilu tahun 2014 caleg mendorong institusi sosial agar dapat mengaktifkan aktor-aktor di internal organisasi komunitas yang memiliki pengaruh yang lebih besar bidang sosial, politik dan ekonomi. Aktor-aktor yang berada di internal organisasi tidak dengan mudah menerima “pengaruh” untuk memberikan dukungan terhadap caleg. Terdapat “filter” dalam menyeleksi caleg yang akan diberikan dukungan. “Filter” tersebut seperti mekanisme pemeriksaan terhadap jaringan personal, *track record* personal, kontribusi terhadap komunitas etnis sebagai pertimbangan untuk dalam memberi dukungan.

Organisasi komunitas memiliki dinamika internal. Dinamika tersebut berkaitan dengan aktor, nilai dan kepentingan sehingga dalam rangka mendapatkan perhatian maka diperlukan keterampilan caleg untuk mendialogkan tujuan kepada aktor yang ada. Merujuk pada teori Bourdieu (2005) yang menyinggung tentang kemampuan individu mempersepsikan dan mentransformasikan struktur objektif untuk membentuk struktur tujuan dan pada saat yang sama turut dibentuk oleh struktur tujuan. Hal ini bisa digambarkan sebagai aktivitas dialog negosiasi dari sejumlah kepentingan yang berbeda yang akhirnya membentuk sebuah jalan tengah sebagai kesepakatan. Kesepakatan dengan jalan tengah inilah yang akhirnya menjadi struktur tujuan bersama diantara aktor-aktor yang bersepakat membentuk komitmen dukungan secara penuh atau sebagian dukungan.

Organisasi komunitas etnis memiliki kemampuan sebagai struktur organisasi. Kemampuan tersebut terletak pada struktur dan kuantitas keanggotaan dan yang tidak kalah penting adalah nilai budaya yang melekat sebagai identitas perekat. Struktur organisasi meliputi peran dan jaringan wilayah kerja. Kuantitas keanggotaan menyangkut jumlah pemilih potensial di komunitas etnis serta jaringan personal yang melekat pada tiap individu anggota. Kemudian nilai budaya sebagai identitas memiliki sumber daya yang kuat ketika berhadapan dengan simbol identitas yang sama dapat lebih mudah mentransferkan tujuan dengan pendekatan komunikasi budaya. Dengan demikian upaya caleg etnis Tionghoa untuk memobilisasi suara dari organisasi komunitas bergantung pada ketersediaan jaringan personal caleg untuk dapat menembus struktur organisasi komunitas secara informal. Pada akhirnya secara informal aktor yang berada di dalam struktur organisasi komunitas mengambil peran sebagai pendukung caleg dengan mendistribusikan sumberdaya yang tersedia.

Bagan 1: Pola kecenderungan mobilisasi suara dalam persaingan di dapil Sumut 1.



Ilustrasi pada bagan di atas menggambarkan terjadi pergeseran terhadap pola kecenderungan mobilisasi suara di pemilu 2004, 2009 dan 2014 yang dilakukan caleg etnis Tionghoa. Pola kecenderungan tersebut sekaligus mengindikasikan sumber jaringan yang digunakan untuk menyentuh lumbung suara. Pada pemilu proporsional

tertutup partai menjadi mesin utama untuk melakukan mobilisasi suara karena partai berperan untuk menentukan caleg terpilih di internal partai (Marzuki, 2007: 522). Pada pemilu proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak mesin utama dalam melakukan mobilisasi suara terkonsentrasi pada caleg (Andriana *et al.*, 2012: 112). Sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak diterapkan sejak pemilu 2004. Pada pemilu 2004 caleg etnis Tionghoa mengandalkan jaringan personal untuk meraih dukungan suara. Jaringan personal seperti kekerabatan dan pertemanan diandalkan untuk menembus berbagai segmentasi pemilih secara sporadis. Pendekatan seperti ini cenderung terjadi pada demografi masyarakat tradisional atau dengan karakter budaya yang kuat seperti di Kalimantan Barat (Jumadi dan Yaakop, 2013: 82).

Pemilu 2009 selain mengandalkan jaringan personal caleg etnis Tionghoa mulai memasuki institusi sosial untuk memobilisasi suara secara informal. Institusi sosial tersebut berbentuk organisasi perkumpulan etnis berbasis sosial. Pada pemilu 2014 meski jaringan personal masih sangat diandalkan namun caleg etnis Tionghoa meningkatkan perhatian mereka kepada institusi sosial (Damanik, 2016: 74-74; Freedman, 2003). Tujuan yang diharapkan caleg terhadap institusi sosial untuk mendapatkan perhatian dari aktor yang berada dalam struktur institusi sosial. Pada konteks ini caleg etnis Tionghoa menyadari institusi sosial memiliki sumber daya yang besar berupa sumber daya manusia di dalamnya kebanyakan sebagai aktor pelaku ekonomi swasta atau pengusaha (Siagian, 2016: 556-559; Siddik, 2010: 2) yang memiliki jaringan patronase atas dasar kesetiaan dan koneksi yang dapat diandalkan menarik suara dari pemilih baru di internal dan eksternal etnis (Aspinall, 2013).

Dengan kekuatan keuangan, fasilitas serta kuantitas karyawan yang dimiliki pengusaha yang berada di dalam institusi sosial maka akan terbuka peluang caleg untuk mendapatkan kebutuhan logistik kampanye dan dukungan suara. Selain itu pertemanan di kalangan pengusaha dan politisi terjalin untuk mengupayakan caleg menjadi terpilih. Keadaan ini berlangsung sebagaimana yang dikemukakan Aspinall (2013: 30) patronase sebagai pendistribusian sumber daya material dalam rangka mencapai tujuan yang didasarkan pada kesetiaan, pertukaran kepentingan dan koneksi. Dalam konteks kota Medan hubungan patronase tersebut berlangsung dengan prinsip saling menguntungkan (Amin, Ridho dan Nasution, 2016) bahkan institusi etnis sudah tertarik terlibat dalam politik praktis dan secara terbuka mengambil posisi sebagai kelompok pendukung di pemilihan kepala daerah (Humaizi, Yusuf dan Sinaga, 2019).

Pergeseran pola mobilisasi ini menandakan terjadi persaingan tinggi di antara sesama caleg etnis Tionghoa di dapil Sumut I untuk memobilisasi suara di lingkungan internal etnis Tionghoa yang sedikit jumlahnya namun memiliki kekuatan untuk

menembus segmentasi pemilih eksternal melalui jaringan pengusaha. Keberhasilan caleg etnis Tionghoa di pemilu merepresentasikan kemenangan bagi *Habitus* yang terbentuk di antara caleg, aktor pengusaha yang terlibat dan simpul-simpul dukungan suara yang dimobilisasi. Dengan kata lain caleg yang terpilih akan maksimal mewakili aspirasi *Habitus*-nya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mobilisasi suara.

Etnis Minoritas Dalam Arena Kontestasi Pemilu

Pemilu legislatif dengan sistem proporsional secara garis besar memberikan peluang kesempatan politik yang sama bagi setiap warga negara. Negara demokrasi dengan karakteristik demografi yang multi etnis seperti Indonesia mempercayai sistem proporsional lebih dapat mewakili peluang keterpilihan anggota legislatif dengan latar belakang sosial (etnis/agama) yang lebih beragam. Kondisi ini turut memelihara tatanan keharmonisan sosial dalam keberagaman demografi.

Partisipasi etnis minoritas dalam pemilu legislatif bukan realitas yang baru. Berdasarkan penelitian terdahulu seperti Jensenius (2016) dan Saalfeld and Bischof, (2013) didapatkan keterlibatan etnis minoritas menjadi caleg di pemilu disebabkan pemenuhan kuota etnis pada kehendak di sistem pemilu dan upaya etnis minoritas secara perorangan maupun kelompok untuk mengirim wakil mereka di legislatif. Hal ini menunjukkan urgensi dari kehadiran caleg etnis minoritas di pemilu disebabkan aspek prosedural yakni mekanisme prosedural kuota dalam sistem pemilu dan aspek substansial yang berkaitan dengan perjuangan terhadap hak-hak etnis minoritas di legislatif. Dalam arena kontestasi pemilu isu minoritas dalam segmentasi etnis memiliki efek untuk menarik pemilih dari etnis yang sama (Collet, 2008; Fisher *et al.*, 2014; Teney *et al.*, 2010), namun terdapat juga studi lainnya yang menjelaskan pilihan terhadap caleg minoritas didasarkan pada kinerja mereka (Juenke dan Shah, 2016).

Bila mengaitkan studi terdahulu dengan realitas sistem pemilu dan hasil pemilu yang diperoleh caleg etnis minoritas (Tionghoa) pada kasus di DPRD provinsi Sumut maka dikoreksi beberapa hal yaitu: 1) sistem pemilu di Indonesia tidak mengadopsi kuota berdasarkan etnis. Sistem proporsional terbuka dianggap mampu mengakomodasi setiap segmentasi caleg, dan 2) Caleg etnis Tionghoa secara maksimal berupaya meraih dukungan suara dari segmentasi etnis Tionghoa. Keadaan ini berlaku sama dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan pemilih etnis cenderung memilih caleg dari etnis yang sama. Situasi dari penelitian terdahulu terhadap kontekstual dalam studi ini hanya berbeda pada sistem pemilu yang tidak mengakomodasi kuota berdasarkan etnis.

Dalam prakteknya di pemilu kebanyakan perebutan suara terjadi antara caleg minoritas dengan caleg mayoritas. Namun berbeda pada kasus di dapil Sumut 1 yang memperlihatkan perebutan suara terjadi pada sesama caleg minoritas (etnis

Tionghoa). Pada daerah pemilihan dengan populasi etnis minoritas yang lebih besar peluang keterpilihan akan semakin terbuka terlebih lagi terjadi pemilu tingkat lokal. Meski demikian tantangan yang terbesar pada arena pemilu di tingkat lokal tersebut menurut Stegmaier, Lewis-Beck dan Smets (2013: 284) mengarah pada identifikasi lingkungan terhadap caleg dari etnis minoritas. Bila ini mengarah pada persepsi lingkungan maka pada konteks studi ini berkaitan dengan daya keberterimaan (*akseptabilitas*) masyarakat terhadap etnis Tionghoa di daerah pemilihan. Jumlah peserta caleg etnis Tionghoa yang tinggi di area pemilihan dan mengharapkan suara dari segmentasi etnis Tionghoa maka proses keberterimaan tersebut lebih awal terseleksi di internal komunitas etnis lalu terjadi di eksternal etnis. Pada keadaan ini *akseptabilitas* berkaitan dengan perilaku politik yang ditampilkan caleg di masa sebelumnya dan di saat pemilu akan dilaksanakan.

Untuk memahami perilaku politisi etnis Tionghoa di kota Medan Wu Ling (2014: 208) mengklasifikasikan ke dalam dua tipe yaitu: 1) tipe idealis dan 2) tipe mengutamakan kepentingan pribadi. Kedua tipe tersebut turut mempengaruhi persepsi pemilih dalam memberikan penilaian terhadap setiap caleg. Situasi ini juga menggambarkan substansi faktor keberterimaan terletak pada kepribadian (*personality*) pada setiap figur caleg. Konsep idealis yang disebutkan Wu Ling (2014: 209-210) berkaitan dengan memiliki sikap reformis dengan indikator berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi, nepotisme dan kolusi. Konsep mengutamakan kepentingan pribadi digambarkan sebagai sikap memanfaatkan jabatan politik untuk tujuan pribadi dengan indikator membangun hubungan saling menguntungkan antara politisi dan pengusaha.

Arena kontestasi dapil sumut 1 berada di kota Medan yang dikenal sebagai daerah perkotaan bisnis. Masyarakat etnis Tionghoa yang identik berprofesi sebagai pebisnis/pengusaha (Koning, 2007; Freedman, 1998: 2, 10; Dawis, 2005: 21). Pebisnis sangat menyukai kota Medan karena daerah ini merupakan kota bisnis. Bagi etnis Tionghoa kota Medan sangat tepat sebagai lokasi tempat tinggal dan melaksanakan bisnis mereka. Mayoritas politisi etnis Tionghoa yang menjadi caleg berprofesi sebagai pelaku bisnis di sektor swasta. Dengan kata lain mayoritas politisi etnis Tionghoa yang terjun di arena dapil Sumut 1 sebagai praktisi ekonomi di sektor swasta.

Perilaku yang terbentuk dalam aktivitas ekonomi swasta sejak era orde baru hingga pasca orde baru telah membentuk jaringan patronase bisnis. Apakah perilaku yang telah terbentuk dalam aktivitas ekonomi memiliki pengaruh kuat dalam membentuk perilaku politik. Dengan mengkonfirmasi teori Wu Ling (2014) tentang tipe politisi etnis Tionghoa di kota Medan maka pada konteks kontestasi yang terjadi di dapil Sumut 1 pada pemilu 2004 hingga pemilu 2014 sebagai kontestasi yang

dipersepsikan publik terutama kalangan masyarakat etnis Tionghoa sebagai kontestasi politik di antara caleg idealis dengan caleg non idealis.

Merujuk pada data hasil pemilu 2004 hingga 2014 didapatkan politisi etnis Tionghoa yang berhasil terpilih di pemilu sebelumnya kemudian terpilih kembali di pemilu berikutnya seperti Sonny Firdaus dan Brilian Moktar (lihat tabel 1). Sementara itu bagi publik perlu waktu yang cukup untuk menilai kepribadian caleg yang baru (pemula). Meskipun kontestasi di antara etnis Tionghoa tinggi di dapil Sumut 1 namun popularitas dan keberterimaan di kalangan etnis Tionghoa cenderung tertuju pada figur caleg petahana.

Berdasarkan data serta asumsi yang terkonfirmasi melalui teori pada akhirnya studi ini mendapati partisipasi politisi etnis Tionghoa terbentuk berdasarkan dua hal yakni: 1) kesadaran diri dan 2) kehendak partai politik. Penelitian terdahulu dari Martin (2016) dan Manzano dan Sanchez (2010) memperlihatkan keberhasilan etnis minoritas di pemilu disebabkan adanya pemilih dengan kefanatikan etnis dan kinerja caleg etnis minoritas yang telah terbukti. Pada kasus ini keterpilihan caleg etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas di pemilu pasca orde baru masih tergolong rendah bila dilihat dari kursi DPRD yang tersedia dan sistem proporsional terbuka yang diterapkan. Rendahnya keterpilihan caleg dari etnis minoritas menurut penelitian Juenke dan Shah (2016) berkaitan dengan ketersediaan caleg yang memiliki peluang terpilih.

Penelitian lainnya dari Mugge (2016) menerangkan bahwa keterpilihan etnis minoritas bergantung pada kemampuan membangun aliansi untuk melakukan mobilisasi suara dan kemampuan ini cenderung ada pada politisi senior. Pada konteks ini caleg petahana dapat disebutkan sebagai politisi senior. Dengan kapasitas jaringan dan pengalaman yang telah ada lebih berpeluang dapat terpilih kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. Studi ini menemukan keberhasilan etnis Tionghoa di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut pada dapil Sumut 1 berkaitan dengan keberterimaan di lingkungan internal dan eksternal etnis Tionghoa dan pilihan keputusan politik di kalangan pemilih etnis Tionghoa yang bersikap rasional di tengah suasana perilaku bisnis yang didasari pada hubungan simbiosis mutualisme.

Penutup

Klasifikasi yang diberikan Wu Ling (2014) mengenai tipe perilaku politik politisi etnis Tionghoa menjadi penentu keberterimaan caleg di lingkungan internal dan di eksternal etnis. Perilaku politik caleg yang menyangkut jaringan personal, pengalaman, kepribadian, interaksi, dan kinerja serta tingginya biaya politik dalam pemilu proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak secara alamiah membentuk fragmentasi politik etnis Tionghoa di dapil Sumut 1. Jumlah caleg etnis

Tionghoa yang banyak sebagai produk dari perkembangan proses demokrasi yang didorong oleh *Habitus* yang ada. Geografis dapil Sumut 1 yang berada di kota medan dengan predikat kota bisnis di wilayah provinsi Sumatera Utara menjadi daya tarik pengusaha untuk melibatkan diri pada aktivitas politik elektoral.

Jaringan patronase di kota Medan dalam segmentasi aktor dan bidang kegiatan sangat beragam. Jaringan patronase terbanyak dan terbesar akan memudahkan caleg etnis Tionghoa untuk membentuk perilaku politik secara efektif. Pemilihan yang dilakukan secara langsung dan jumlah pertemuan untuk merumuskan strategi meraih dukungan suara yang dilakukan secara intens maka keadaan ini memerlukan suplai finansial yang tinggi. Dengan demikian kekuatan finansial sebagai salah satu kunci penting yang targetkan caleg dalam membentuk hubungannya dengan jaringan patronase tersebut.

Pada tataran aplikasi pendekatan institusi etnis dan personal menjadi fokus utama untuk meraih jaringan patronase. Jaringan patronase yang telah ada terbentuk di internal institusi kemudian bekerja membentuk jaringan-jaringan dan pada akhirnya melahirkan simpul-simpul pendukung di tengah demografi pemilih yang plural. Keadaan ini berlangsung untuk mensuplai suara dari lingkungan internal dan eksternal etnis di tengah tingginya jumlah caleg yang bertarung. Di sisi lain fenomena tingginya kontestasi antara caleg etnis Tionghoa di dapil Sumut 1 menunjukkan mesin partai bekerja sebagai counter untuk menahan peningkatan suara bagi partai lainnya yang mengajukan caleg dari etnis Tionghoa.

Studi ini memberikan beberapa rekomendasi. *Pertama*, politisi etnis Tionghoa perlu memperluas pencalonan pada dapil lainnya. *Kedua*, mobilisasi dukungan suara dalam segmentasi internal etnis dapat memperbesar peluang perolehan suara namun fokus tersebut harus diperluas pada lintas segmentasi etnis lainnya. *Ketiga*, caleg terpilih penting untuk mewakili aspirasi masyarakat luas di dapil, ini berkaitan dengan popularitas, jaringan, akseptabilitas dan elektabilitas di masa pemilihan berikutnya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh informan penelitian, Universitas Medan Area, M. Erwin Siregar selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, Robert Tua Siregar, dan Anggiat Sinurat, dan beberapa akademisi doktor lainnya di bidang sosial dan di bidang politik yang turut memberikan sumbangsih pemikiran dalam penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan dana untuk penelitian, kepenulisan, dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Amin, M., Ridho, H. and Nasution, M. A. (2016) 'Mutual Symbiosis and Transactional Relationships (A Study on the Relationship between the Youth Organizations with the Candidates of the Parliament from the Electoral District of North Sumatera I in 2014 General Election)', *PONTE: International Scientific Researches Journal*, 72(10), pp. 320–334. doi: 10.21506/j.ponte.2016.10.28.
- Andriana, N. et al. (2012) *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung. Available at: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=f4cc8b75-fa78-c02b-c3ad-08fc9bc8d030&groupId=252038.
- Arifin, E. N., Hasbullah, M. S. and Pramono, A. (2017) 'Chinese Indonesians: how many, who and where?', *Asian Ethnicity*, 18(3), pp. 310–329. doi: 10.1080/14631369.2016.1227236.
- Aspinall, E. (2013) 'A Nation In Fragments: Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia', *Critical Asian Studies*, 45(1), pp. 27–54. doi: 10.1080/14672715.2013.758820.
- Aspinall, E., Dettman, S. and Warburton, E. (2011) 'When Religion Trumps Ethnicity: A Regional Election Case Study From Indonesia', *South East Asia Research*, 19(1), pp. 27–58. doi: 10.5367/sear.2011.0034.
- Bourdieu, P. (2005) *Habitus: A Sense of Place*. Second Edi. Edited by J. Hillier and E. Rooksby. Oxon: Ashgate Publishing Published.
- Budiatri, A. P. et al. (2018) *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Chong, W.-L. (2015) 'Local Politics and Chinese Indonesian Business in Post-Suharto Era', *Southeast Asian Studies*, 4(3), pp. 487–532. doi: 10.20495/seas.4.3_487.
- Chong, W.-L. (2016) 'Rethinking the Position of Ethnic Chinese Indonesians', in *9th International Conference of the International Society for the Study of Chinese Overseas*. Vancouver-Canada, pp. 1–34. Available at: <http://eprints.um.edu.my/16031/1/0001.pdf>.
- Chong, W. (2018) *Chinese Indonesians in Post-Suharto Indonesia: Democratisation and Ethnic Minorities*. Hong Kong: Hong Kong University Press. Available at: <https://hkupress.hku.hk/pro/con/1697.pdf>.
- Collet, C. (2008) 'Minority Candidates, Alternative Media, and Multiethnic America: Deracialization or Toggling?', *Perspectives on Politics*, 6(4), pp. 707–728. doi: 10.1017/S1537592708081875.
- Creswell, J. W. (2014) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fourth Edi. London: Sage Publications.

- Damanik, A. T. (2016b) 'Medan, North Sumatra: Between Ethnic Politics and Money Politics', in Aspinall, E. and Sukmajati, M. (eds) *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Dawis, A. (2005) *The Indonesian Chinese: Their Search for Identity and Development of Collective Memory Through the Media*, Dissertation. New York University. Available at: https://www.researchgate.net/publication/34182091_The_Indonesian_Chinese_their_search_for_identity_and_development_of_collective_memory_through_the_media.
- Eifert, Y. (2012) *Conflict Formation and Transformation in Indonesia: Chinese and Indigenous Indonesians on Their Way to Peace? A Peace and Conflict Analysis According to the Transcend Method*, Dissertation. Universität Giessen.
- Fisher, S. D. et al. (2014) 'Candidate Ethnicity and Vote Choice in Britain', *British Journal of Political Science*, 45(4), pp. 883–905. doi: 10.1017/S0007123413000562.
- Freedman, A. (2003) 'Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in Indonesia', *Asian Ethnicity*, 4(3), pp. 439–452. doi: 10.1080/1343900032000117259.
- Freedman, A. L. (1998) *Politicization and Influence in Chinese Communities Overseas: The United States, Indonesia, and Malaysia*, Dissertation. doi: 10.16953/deusbed.74839.
- Giblin, S. M. (2003) *Being Chinese and Indonesian: Chinese Organisations in Post-Suharto Indonesia*, Dissertation. The University of Leeds. Available at: http://etheses.whiterose.ac.uk/653/1/uk_bl_ethos_403060.pdf.
- Giddens, A. (1984) *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press.
- Humaizi, Ermansyah and Sinaga, R. S. (2018) 'Concord Communications And Interactions Between Ethnic Groups Supporting The Candidate; Case Study On Paguyuban Suku Tionghoa Indonesia And Joko Tingkir In Election Of Medan City, 2015', *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris: Atlantis Press, 136(1), pp. 139–143.
- Humaizi, Yusuf, M. and Sinaga, R. S. (2019) 'The interest pattern of ethnic groups as supporters: A case study of pilkada of medan city in 2015', *Intellectual Discourse*, 27(1), pp. 269–283. Available at: <https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/islam/article/view/1356/851>.
- Jensenius, F. R. (2016) 'Competing Inequalities? On the Intersection of Gender and Ethnicity in Candidate Nominations in Indian Elections', *Government and Opposition*, 51(3), pp. 440–463. doi: 10.1017/gov.2016.8.
- Juenke, E. G. and Shah, P. (2016) 'Demand and Supply: Racial and Ethnic Minority Candidates in White Districts', *The Journal of Race, Ethnicity, and Politics*, 1(1), pp. 60–90. doi: 10.1017/rep.2015.2.
- Jumadi and Yaakop, M. R. (2013) 'Keterwakilan Etnis Dalam Kepemimpinan Politik Pasca Orde Baru', *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 11(2), pp. 81–90. Available

- at: <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/1917/1886>.
- Koning, J. (2007) 'Chineseness and Chinese Indonesian Business Practices: A Generational and Discursive Enquiry', *East Asia*, 24(2), pp. 129–152. doi: 10.1007/s12140-007-9011-2.
- Manzano, S. and Sanchez, G. R. (2010) 'Take one for the team? Limits of shared ethnicity and candidate preferences', *Political Research Quarterly*, 63(3), pp. 568–580. doi: 10.1177/1065912909333130.
- Martin, N. S. (2016) 'Do Ethnic Minority Candidates Mobilise Ethnic Minority Voters? Evidence from the 2010 UK General Election', *Parliamentary Affairs*, 69(1), pp. 159–180. doi: 10.1093/pa/gsv014.
- Marzuki (2007) *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat pada DPRD-DPRD di Provinsi Sumatera Utara*, Disertasi. Universitas Sumatera Utara.
- Mozingo, D. P. (1973) *Chinese Policy in Indonesia, 1949-1967*, Dissertation. University of California. Available at: https://www.researchgate.net/publication/36348281_Chinese_policy_in_Indonesia_1949-1967.
- Mugge, L. M. (2016) 'Intersectionality, Recruitment and Selection: Ethnic Minority Candidates in Dutch Parties', *Parliamentary Affairs*, 69(3), pp. 1–19. doi: 10.1093/pa/gsv060.
- Mukmin, B. A. and Damanik, M. R. S. (2018) 'Demografi Politik Sumatera Utara: Analisis Pilihan Politik Masyarakat Berdasarkan Persebaran Penduduk, Agama dan Etnis Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di Kota Medan', *Jurnal Geografi*, 10(2). Available at: <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/article/view/10532>.
- Panggabean, S. R. and Smith, B. (2011) 'Explaining Anti-Chinese Riots in Late 20th Century Indonesia', *World Development*. Elsevier Ltd, 39(2), pp. 231–242. doi: 10.1016/j.worlddev.2009.11.036.
- Prasetyawan, W. (2014) 'Ethnicity and Voting Patterns in the 2007 and 2012 Gubernatorial Elections in Jakarta', *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33(1), pp. 29–54. doi: 10.1177/186810341403300103.
- Protsyk, O. and Marius, L. (2010) 'Communist and Post-Communist Studies Electoral rules and minority representation in Romania', *Communist and Post-Communist Studies*. Elsevier Ltd, 43(1), pp. 31–41. doi: 10.1016/j.postcomstud.2010.01.006.
- Saalfeld, T. and Bischof, D. (2013) 'Minority-Ethnic MPs and the substantive representation of minority interests in the house of commons, 2005-2011', *Parliamentary Affairs*, 66(2), pp. 305–328. doi: 10.1093/pa/gss084.
- Sai, S.-M. and Hoon, C.-Y. (eds) (2013) *Chinese Indonesians Reassessed: History, Religion and Belonging*. London: Routledge. doi: 10.4324/9780203095362.

- Sarumpaet, B. A. M. (2009) *Politik Tionghoa Kota Medan, Thesis*. Universitas Gajah Mada.
- Siagian, M. (2016) 'Mutualistic Social Relationship between Tamil and Chinese Communities in the Formation of Social Space in Kampung Keling Medan', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Elsevier B.V., 216(1), pp. 552–560. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.12.020.
- Siddik, A. F. (2010) *Toward Integration: Ethnic Chinese Movement In Post-Suharto Indonesia, Thesis*. Cornell University. Available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.833.2763&rep=rep1&type=pdf>.
- Sinaga, R. S. *et al.* (2018) 'Chinese Ethnic Competition in North Sumatera Electoral District I: Case Study on the Regional House of Representative of North Sumatera Province Member Election, Indonesia 2014', *Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 6(11), pp. 2080–2085. doi: 10.21276/sjahss.2018.6.11.5.
- Sinaga, R. S. *et al.* (2019) 'Why in Various Party and Moving to Other Politics Parties: A Case Studi of Chinese Ethnic in Indonesia, North Sumatra Province', *Innovative Issues and Approaches in Social Sciences*, 12(1), pp. 70–86. doi: 10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2019-no1-art4.
- Stegmaier, M., Lewis-Beck, M. S. and Smets, K. (2013) 'Standing for parliament: Do black, asian and minority ethnic candidates pay extra?', *Parliamentary Affairs*, 66(2), pp. 268–285. doi: 10.1093/pa/ggso86.
- Tans, R. (2012) 'Mobilizing Resources, Building Coalitions: Local Power in Indonesia.', *Policy Studies*, 72(64), pp. 1–92. doi: 10.21506/j.ponte.2016.10.28.
- Teney, C. *et al.* (2010) 'Ethnic voting in Brussels: Voting patterns among ethnic minorities in Brussels (Belgium) during the 2006 local elections', *Acta Politica*. Palgrave Macmillan, 45(3), pp. 273–297. doi: 10.1057/ap.2009.25.
- Widoyoko, J. D. (2018) 'Politik, Patronase dan Pengadaan: Studi Kasus Korupsi Proyek Wisma Atlet', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), pp. 1–23. Available at: <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/200>.
- Wu Ling, C. (2014) *Democratisation and Ethnic Minorities: Chinese Indonesians Post-Suharto Indonesia, Dissertation*. National University of Singapore. Available at: [http://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/10635/78921/1/Chong Wu Ling PhD Thesis.pdf](http://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/10635/78921/1/Chong%20Wu%20Ling%20PhD%20Thesis.pdf).
- Yan, Z. (2009) *Minority Representation and Political Participation of Ethnic Minorities: A Case Study of Chinese Canadians in Democratic Canada, Thesis*. University of Regina. Available at: <http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR55077.PDF>.

Tentang Penulis

Rudi Salam Sinaga adalah Dosen Magister Administrasi Publik-Pascasarjana Universitas Medan Area. Memiliki focus kajian pada wilayah ilmu politik meliputi politik kebijakan, studi kelompok di pemilu dan partai politik. Menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada lembaga swadaya masyarakat bernama Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL).

Adam adalah Dosen Administrasi Publik, Universitas Medan Area.